

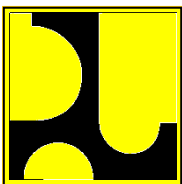
**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CALON PENYEDIA  
JASA MELAKUKAN PENDAFTARAN LELANG DAN  
TIDAK MELANJUTKAN MEMASUKAN DOKUMEN  
PENAWARAN PADA PENGADAAN JASA  
KONSTRUKSI PEMERINTAH**

**TESIS**

**Oleh:  
Syafran Noferi  
2013831024**

**Pembimbing:  
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Wibowo**

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI  
KERJASAMA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN  
KONSTRUKSI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT  
DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
JUNI 2017**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CALON PENYEDIA JASA  
MELAKUKAN PENDAFTARAN LELANG DAN TIDAK  
MELANJUTKAN MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PADA  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH**

**Oleh:**

**Syafran Noferi  
2013831024**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:**

**Senin, 5 Juni 2017**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Wibowo**

TES - PMTS  
NOF  
9/17  
Ers 1847



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI  
KERJASAMA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN  
KONSTRUKSI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT  
DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
JUNI 2017**



**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CALON PENYEDIA JASA  
MELAKUKAN PENDAFTARAN LELANG DAN TIDAK  
MELANJUTKAN MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN  
PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH**



**TESIS**

**Syafran Noferi**

**2013831024**

**PERSETUJUAN TESIS**

**Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Wibowo**  
Pembimbing Tunggal/Penguji

**Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc**  
Penguji

**Ir. Drs. Hasan Basri, SP1, MT, M.Si**  
Penguji

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI  
KERJASAMA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN  
KONSTRUKSI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT  
DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
JUNI 2017**





## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Syafran Noferi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013831024  
Program Studi : Manajemen Proyek Konstruksi  
Sekolah Pascasarjana  
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :

**“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CALON PENYEDIA JASA  
MELAKUKAN PENDAFTARAN LELANG DAN TIDAK  
MELANJUTKAN MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PADA  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dibawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 5 Juni 2017



SYAFRAN NOFERI

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CALON PENYEDIA JASA  
MELAKUKAN PENDAFTARAN LELANG DAN TIDAK  
MELANJUTKAN MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PADA  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH**

**Syafran Noferi (NPM: 2013831024)  
Pembimbing: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Wibowo  
Magister Teknik Sipil  
Bandung  
Mei 2017**

**ABSTRAK**

E-procurement untuk barang dan jasa publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, dilaksanakan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengikuti prinsip-prinsip bahwa pengadaan apa pun harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan Akuntabel. Namun, praktiknya sering menunjukkan bahwa tingkat penawaran - rasio antara jumlah calon penawar yang mendaftar ke sistem LPSE dan yang mengajukan proposal penawaran sangat rendah. Meskipun tingkat penawaran yang rendah lazim dalam pengadaan publik Indonesia, masih sedikit upaya penelitian yang secara khusus ditujukan untuk menggalikan masalah ini. Tesis ini bertujuan untuk menyelidiki alasan di balik keputusan kontraktor mendaftar lelang tetapi tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebanyak 21 dan 58 variabel yang diidentifikasi pertama kali berdasarkan tinjauan literatur untuk masing-masing kedua keputusan ini. Data tesis ini dikumpulkan melalui survei. Sebanyak 190 kuesioner disebarkan ke perusahaan konstruksi di Provinsi X dan 97 kuesioner selesai dikembalikan, yang mencerminkan bahwa tingkat tanggapan sebesar 50%. Dalam survei tersebut, responden diminta untuk mengungkapkan kesesuaian mereka pada enam angka Skala Likert untuk pernyataan yang terkait dengan variabel yang diidentifikasi. Berdasarkan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, 7 dan 11 atribut dihapus, menyisakan 14 dan 47 atribut untuk analisis selanjutnya. Analisis faktor menghasilkan tiga faktor baru, yaitu keuntungan penyedia jasa, hukum dan peraturan, dan kepentingan pribadi untuk keputusan yang pertama dan lima faktor baru, yaitu waktu dan informasi pekerjaan, kemampuan penyedia jasa, proses lelang dan persekongkolan, administrasi pelelangan dan LPSE, dan lain-lain. untuk keputusan kedua. Penelitian ini bersifat relevan. Penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara rasio tingkat penawaran dan rasio harga penawaran akhir penyedia jasa signifikan secara statistik negatif, menunjukkan bahwa tingkat penawaran rendah dapat menghambat pemilik pekerjaan, sampai batas tertentu, memiliki kompetisi yang adil dan memperoleh nilai penawaran terbaik untuk proyek mereka. Oleh karena itu, tesis ini juga merekomendasikan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tingkat penawaran rendah pada tahap kesimpulannya.

**Kata kunci:** e-procurement, proyek-proyek konstruksi publik, mendaftar tapi tidak memasukan penawaran, analisis faktor, analisis korelasi



# FACTORS ANALYSIS OF CONTRACTORS DECISIONS TO REGISTER BUT NOT SUBMITTING THEIR BID PROPOSALS IN E-PROCUREMENT SYSTEM

Syafran Noferi (NPM: 2013831024)  
Supervisor : Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Wibowo  
Master of Civil Engineering  
Bandung  
Mei 2017

## ABSTRACT

*The e-procurement for public goods and services based on Presidential Regulation No. 4 2015, implemented through Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) system follows the principles that any procurement must be undertaken in efficient, effective, transparent, open, competitive, fair and accountable manner. However, practice often suggests that the bidding rate—the ratio between the number of potential bidders registering into the LPSE system and that of eventually submitting bid proposals is very low. While the low bidding rate is commonplace in the Indonesian public procurement, there has been a scant number of research efforts specifically dedicated to delving into this issue. This thesis aims at investigating the rationales behind contractors decision to register but not to proceed to the next stage. A total of 21 and 58 attributes were first identified based on the literature review for these two decisions, respectively. The data for this thesis were collected by means of survey. A total of 190 questionnaire sets were distributed to construction firms in Province X and 97 completed questionnaires were returned, reflecting about a 50 % response rate. In the survey, respondents were asked to express their agreements on a six-point Likert Scale on statements related to the identified attributes. Based on Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, 7 and 11 attributes were removed, leaving 14 and 47 attributes for the next analysis. The factor analysis resulted in three new factors i.e. expected bidders profits, laws and regulations, and vested interest for the first decision and five new factors i.e. duration and work information, bidders' ability, bidding processes and conspiracy, bidding administration and LPSE, and others for the second decision. The findings are relevant. It has been demonstrated that the correlation between the bidding rate and the ratio of final bid prices and owner estimates is significantly statistically negative, suggesting that low bidding rates can prevent owners, to some extent, from having fair competitions and obtaining best values for their projects. Therefore, this thesis also recommends some improvement actions necessary to address the low bidding rate issue at the conclusion.*

**Keywords:** *e-procurement, public construction projects, e-procurement, registered-but-not-submitting attributes, factor analysis, correlation analysis.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “**Analisis Faktor Penyebab Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran Lelang dan Tidak Melanjutkan Memasukkan Dokumen Penawaran pada Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah**” ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc, selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Sipil.
2. Bapak Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Wibowo, ST. MT, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan tesis ini;
3. Seluruh dosen Program Magister Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan Bandung atas segala ilmu dan wawasan yang diberikan selama ini.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pihak yang telah memberikan beasiswa sehingga penulis bisa mengikuti pendidikan Strata 2 Magister Teknik Sipil di Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
5. Ayah dan Ibu serta keluarga yang selama ini menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan semua tugas terkait studi S2 yang penulis jalani.

6. Istri saya Secyliana, SE, dan anak- anakku Prayoga Ananta Maris, Kevin Ibrahim Maris dan Yusuf Faizan Maris atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran menunggu dirumah selama beberapa waktu;
7. Rekan-rekan program studi Magister Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi angkatan 2013 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan laporan penelitian tesis ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam memberikan semangat dan dorongan, serta dalam pengumpulan data dan literatur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini mungkin masih mengandung kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Bandung, 5 Juni 2017

Penulis

Syafran Noferi



# DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	iii
<b>ABSTRAK</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1.5 Signifikasi Penelitian.....	8
1.6 Batasan Masalah.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Sistem E-procurement.....	11
2.1.1 Definisi E-Procurement.....	12
2.1.2 Tujuan dan Manfaat.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17

2.3 Rangkuman.....	32
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Umum.....	35
3.2 Posisi Penelitian.....	37
3.3 Identifikasi Variabel.....	37
3.4 Pengembangan Instrumen Penelitian.....	41
3.5 Pengumpulan Data.....	43
3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	43
3.7 Analisis dan Pembahasan.....	46
3.8 Kesimpulan dan Saran.....	50
<b>BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Demografi Responden.....	51
4.2 Tahapan Analisis Data.....	52
4.2.1 Uji Validitas.....	52
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	53
4.2.3 Analisis Deskriptif.....	56
4.2.4 Analisis Faktor.....	60
4.2.5 Analisis Korelasi Rasio Pemasukan Penawaran dengan Harga Penawaran.....	82
4.2.6 Uji Beda.....	88
4.3 Pembahasan.....	90
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>101</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tujuan Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	15
Gambar 3.1	Diagram Alir Metode Penelitian.....	36
Gambar 4.1	Scree Plot.....	62
Gambar 4.2	Scree Plot.....	70
Gambar 4.3	Hubungan Harga Penawaran dengan Jumlah Penawaran.....	82
Gambar 4.4	Grafik Hubungan Rasio Pemasukan Dokumen Penawaran dengan Pendaftaran Lelang dan Harga Perkiraan Sendiri	86
Gambar 4.5	Grafik Hubungan Rasio Pemasukan Dokumen Penawaran dengan Pendaftaran Lelang dan Jumlah Pendaftar .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Jumlah Pendaftar Lelang dan Jumlah Pemasukan Penawaran di Provinsi X Tahun 2011–2015.....	5
Tabel 2.1	Faktor Persekongkolan dalam Pelaksanaan Pengadaan Proyek Pemerintah.....	18
Tabel 2.2	Potensi Penyimpangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	19
Tabel 2.3	Rangkuman Penelitian Terdahulu Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	32
Tabel 3.1.	Perbedaan Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Faktor Alasan Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran Lelang.....	38
Tabel 3.3	Faktor Alasan Calon Penyedia Jasa Tidak Memasukan Dokumen Penawaran.....	39
Tabel 3.4	Penilaian Skala Berdasarkan Skala Likert.....	42
Tabel 3.5	Ukuran dan Rekomendasi Nilai Keiser Meyers Oikin (KMO).....	48
Tabel 4.1	Uji Reliabilitas Faktor Penyebab Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran Lelang.....	54
Tabel 4.2	Uji Reliabilitas Faktor Penyebab Calon Penyedia Jasa Tidak Memasukan Dokumen Penawaran.....	55
Tabel 4.3	Analisis Deskriptif Faktor Penyebab Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran.....	57
Tabel 4.4	Analisis Deskriptif Faktor Penyebab Calon Penyedia Jasa Tidak Memasukan Penawaran.....	58
Tabel 4.5	KMO and Bartlett's Test.....	60
Tabel 4.6	Total Variance Explained.....	61
Tabel 4.7	Rotated Component Matrix.....	62
Tabel 4.8	Component Transformation Matrix.....	63

Tabel 4.9	Interpretasi Faktor.....	63
Tabel 4.10	Pemberian Nama Komponen.....	64
Tabel 4.11	Dekriptif Faktor Keberuntungan.....	65
Tabel 4.12	Dekriptif Faktor Keuntungan Penyedia Jasa.....	65
Tabel 4.13	Dekriptif Faktor Hukum dan Peraturan.....	65
Tabel 4.14	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran.....	66
Tabel 4.15	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran Berdasarkan Pengalaman Perusahaan.....	66
Tabel 4.16	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran Berdasarkan Kualifikasi Perusahaan.....	67
Tabel 4.17	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran Berdasarkan Bidang Konstruksi Perusahaan.....	67
Tabel 4.18	KMO and Bartlett's Test.....	68
Tabel 4.19	KMO and Bartlett's Test.....	68
Tabel 4.20	Total Variance Explained.....	69
Tabel 4.21	Rotated Component Matrix.....	71
Tabel 4.22	Component Transformation Matrix.....	72
Tabel 4.23	Interpretasi Faktor.....	73
Tabel 4.24	Pemberian Nama Komponen.....	74
Tabel 4.25	Dekriptif Faktor Proses Pelelangan dan Persekongkolan.....	77
Tabel 4.26	Deskriptif Faktor Administrasi Pelelangan dan Portal LPSE....	77
Tabel 4.27	Deskriptif Faktor Kemampuan Penyedia Jasa/Perusahaan.....	78
Tabel 4.28	Deskriptif Faktor Waktu dan Informasi Pekerjaan.....	78
Tabel 4.29	Deskriptif Faktor Lain-lain.....	78
Tabel 4.30	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Tidak Melakukan Pemasukan Penawaran.....	79

Tabel 4.31	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Tidak Memasukan Dokumen Penawaran Berdasarkan Pengalaman Perusahaan...	79
Tabel 4.32	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Tidak Memasukan Dokumen Penawaran Berdasarkan Kualifikasi Perusahaan.....	80
Tabel 4.33	Peringkat Faktor Calon Penyedia Jasa Tidak Memasukan Dokumen Penawaran Berdasarkan Bidang Konstruksi Perusahaan.....	81
Tabel 4.34	Analisis Korelasi Harga Penawaran dengan Pemasukan Penawaran.....	83
Tabel 4.35	Analisis Korelasi Harga Penawaran dengan Pemasukan Penawaran Bidang Konstruksi Jalan dan Jembatan.....	84
Tabel 4.36	Analisis Korelasi Harga Penawaran dengan Pemasukan Penawaran Bidang Konstruksi Bangunan Gedung.....	84
Tabel 4.37	Analisis Korelasi Harga Penawaran dengan Pemasukan Penawaran Bidang Konstruksi Irigasi dan Pengairan.....	85
Tabel 4.38	Analisis Korelasi Rasio Pemasukan Dokumen Penawaran dengan Pendaftaran Lelang dan Biaya HPS.....	86
Tabel 4.39	Analisis Korelasi Rasio Pemasukan Dokumen Penawaran dengan Pendaftaran Lelang dan Jumlah Pendaftar.....	87
Tabel 4.40	Deskriptif Rasio Pendaftaran Lelang dengan Pemasukan Penawaran Bidang Konstruksi.....	88
Tabel 4.41	Test of Homogeneity of Variances.....	88
Tabel 4.42	ANOVA.....	88
Tabel 4.43	Rasio yang Wajar Hasil Perhitungan Analitik dan Simulasi untuk Berbagai Nilai $n$ .....	93

## **DAFTAR SINGKATAN**

AHP	= Analytical Hierarchy Process
ANP	= Analytic Network Process
APBD	= Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
CFA	= Confirmatory Factor Analysis
EFA	= Exploratory Factor Analysis
HPS	= Harga Perkiraan Sendiri
KKN	= Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KMO	= Kaiser Meyer Oikin
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
LKPP	= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	= Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MSA	= Measure of sampling Adequacy
PA	= Pengguna Anggaran
PCA	= Principal Component Analysis
POKJA	= Kelompok Kerja
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
SPPS	= Statistical Product and Service Solution
ULP	= Unit Layanan Pengadaan



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner.....	105
Lampiran 2	Tabel $r$ .....	113
Lampiran 3	Uji Validitas Faktor Penyebab Calon Penyedia Jasa Melakukan Pendaftaran.....	117
Lampiran 4	Uji Validitas Faktor Penyebab Calon Penyedia Jasa Tidak Memasukan Dokumen Penawaran.....	119
Lampiran 5	Tabel Anti Image Matrices.....	131
Lampiran 6	Tabel Anti Image Matrices.....	132
Lampiran 7	Tabel Anti Image Matrices.....	138
Lampiran 8	Data Proyek Konstruksi 2011- 2015.....	144
Lampiran 9	Tabel F.....	148

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jasa Konstruksi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 (UU No. 18/1999) sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian pekerjaan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Lebih lanjut dalam UU No. 18/1999 dijelaskan dalam pekerjaan jasa konstruksi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, bisa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi serta pengawasan konstruksi.

Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 ditetapkan terdiri dari:

- a. kualifikasi usaha besar
- b. kualifikasi usaha menengah
- c. kualifikasi usaha kecil

Dalam kegiatan proyek konstruksi beberapa tahapan proyek yang dilakukan secara umum terdiri dari beberapa tahapan (Ervianto, 2005), yaitu : Tahap studi kelayakan, Tahap penjelasan (*briefing*), Tahap perancangan (*design*), Tahap pengadaan (*Procurement*), Tahap pelaksanaan (*construction*), Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan (*maintenance and start-up*)

Tahap pengadaan (*procurement*) merupakan salah satu tahapan yang penting untuk mendapatkan calon penyedia barang dan jasa. Pelelangan merupakan salah satu cara pemilihan bagi pengguna barang/jasa untuk mencari penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Sementara itu, bagi kontraktor atau penyedia jasa mengikuti lelang untuk mendapatkan kontrak pekerjaan merupakan salah satu cara untuk menjaga agar perusahaan tetap beroperasi, memperoleh laba dan keuntungan, mendapatkan pengalaman dan teknologi baru serta menjaga kelangsungan kontrak dengan pemilik pekerjaan, subkontraktor, serta mempertahankan ikatan kerja dengan staf dan pekerja yang cakap (Soeharto,2002).

Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang harus berbasis elektronik atau lebih sering dikenal dengan *E-procurement*. *Electronic Procurement (E-Procurement)* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi

dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). *E-Procurement* merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi tindakan kecurangan yang biasa terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat (1) bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik.

*E-Procurement* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* sama persis dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara manual, tetapi tahapan pelaksanaannya secara elektronik. *E-purchasing* menggunakan cara pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka secara transparan.

Prinsip-prinsip *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 adalah :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian fenomena yang sering terjadi adalah ditemukannya beberapa masalah dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah paket pekerjaan yang mana terdapat banyak penyedia jasa yang mendaftar ke LPSE untuk paket pekerjaan tersebut tetapi hanya sedikit yang melanjutkan sampai ke pemasukan penawaran, sebagai contoh, di Provinsi X (lihat Tabel 1.1).

**Tabel 1.1.** Persentase Jumlah Pendaftar Lelang dan Jumlah Pemasukan Penawaran di Provinsi X Tahun 2011–2015

Tahun Anggaran	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pendaftar Lelang dengan Pemasukan Penawaran 10–20 %	12	8	27	17	15
Persentase Pendaftar Lelang dengan Pemasukan Penawaran 20–30 %	10	2	13	13	12
Persentase Pendaftar Lelang dengan Pemasukan Penawaran > 30 %	8	5	0	0	5
Jumlah paket pekerjaan	30	15	40	30	32

Sumber : Hasil Olahan

Sebagai contoh, pada tahun 2011, persentase antara pendaftar lelang dengan pemasukan penawaran 10–20 % sebanyak 12 paket (40%), 20–30 % sebanyak 10 paket (33,3%) dan di atas 30 % sebanyak 8 paket (26,7%). Pada tahun 2015 persentase antara pendaftar lelang dengan pemasukan penawaran 10–20 % sebanyak 15 paket (46,9%), 20–30 % sebanyak 12 paket (37,5%) dan diatas 30 % sebanyak 5 paket (15,6%). Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa jumlah pendaftar lelang dan melanjutkan memasukan penawaran sedikit sekali yaitu antara 10% sampai dengan 20% saja.

Di satu sisi, sedikitnya jumlah dokumen penawaran yang masuk tentunya memudahkan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) dalam melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan. Namun di sisi lain sedikitnya jumlah penawaran yang masuk justru akan mengurangi tingkat persaingan pelelangan, sehingga POKJA ULP akan sulit mendapatkan alternatif penawaran yang benar-benar kompetitif, apalagi jika dikaitkan dengan sistem pelelangan yang berlaku. Dalam sistem pelelangan di Indonesia yang menggunakan evaluasi sistem gugur dengan evaluasi harga terendah tentunya diharapkan diperoleh harga penawaran yang serendah mungkin yang sama atau lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Namun kenyataannya dengan sedikitnya jumlah yang memasukan dokumen penawaran, rasio antara harga penawaran dan HPS belum terlalu signifikan. Contoh, berdasarkan data pengadaan berbasis elektronik penuh (*full e-procurement*) di Provinsi X dari tahun 2011 sampai 2015 telah dikontrakkan 147 paket pekerjaan di sektor kebinamargaan dengan nilai mencapai Rp. 1,16 triliun yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan rasio antara 0,80–0,99. Rasio tersebut masih dianggap di luar nilai kewajaran yang diharapkan yaitu antara 0,65–0,84 (Wibowo, 2015).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, berikut pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tesis ini :

- a. Faktor apa yang mempengaruhi ketertarikan penyedia jasa untuk melakukan pendaftaran lelang tetapi tidak melanjutkan memasukkan dokumen penawaran terhadap lelang pekerjaan konstruksi?
- b. Bagaimana dampak dari banyak yang menawar tetapi tidak melanjutkan memasukkan dokumen penawaran atau bahkan tidak melanjutkan jika sudah lulus kualifikasi ketika diundang pembuktian kualifikasi tidak hadir?
- c. Apakah ada korelasi antara rasio pendaftaran dan pemasukan dokumen dan rasio antara harga pemenang dan HPS?
- d. Bagaimana solusi untuk mengurangi dampak dari banyaknya yang mendaftar tetapi tidak melanjutkan penawaran jika ditemukan bahwa dampak tersebut signifikan?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah teridentifikasi, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tesis ini :

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketertarikan penyedia jasa untuk melakukan pendaftaran lelang pekerjaan konstruksi dan faktor yang menyebabkan calon penyedia jasa tidak melanjutkan memasukkan dokumen penawaran.
- b. Mengkaji dampak dari banyak yang menawar tetapi tidak melanjutkan memasukkan dokumen penawaran atau bahkan tidak melanjutkan jika sudah lulus kualifikasi ketika diundang pembuktian kualifikasi tidak hadir.
- c. Mengetahui ada tidaknya korelasi antara rasio pendaftaran dan pemasukan dokumen dan rasio antara harga pemenang dan HPS
- d. Mengusulkan solusi untuk mengurangi dampak dari banyaknya yang mendaftar tetapi tidak melanjutkan penawaran jika ditemukan bahwa dampak tersebut signifikan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pencerahan kepada penyedia jasa konstruksi serta dapat menjadi referensi bagi para pelaku jasa konstruksi dan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dalam memperbaiki sistem pelelangan secara elektronik di Provinsi X khususnya dan di Indonesia umumnya. Secara teoretis, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memer kaya *body of literature* tentang pengadaan publik di Indonesia yang spesifik dan relatif terbatas.

### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Banyaknya jumlah dan besarnya nilai paket pekerjaan yang ditawarkan setiap tahun di Provinsi X saat masih ini belum diikuti dengan tingkat persaingan lelang yang memadai. Hal ini ditandai dengan sedikitnya jumlah dokumen penawaran yang masuk dibandingkan dengan jumlah peserta lelang yang mendaftar. Kondisi seperti ini tentunya akan sulit untuk mencari calon penyedia jasa yang terbaik terutama dalam harga penawaran.

Untuk mendapatkan calon penyedia jasa yang terbaik tersebut diperlukan iklim pelelangan yang kompetitif, di mana semua pendaftar lelang melakukan pemasukan penawaran, sehingga peluang untuk mendapatkan calon penyedia jasa yang terbaik semakin besar. Dengan demikian, kemungkinan pemerintah menikmati *best value for money* (i.e., mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk setiap rupiah yang dikeluarkan) semakin besar untuk setiap pengadaan jasa konstruksi yang diselenggarakan.

### **1.6 Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Paket jasa konstruksi yang akan di jadikan bahan penelitian adalah pekerjaan di Provinsi X yang didanai oleh APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan APBD dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015 di Portal LPSE Provinsi X dan Portal LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara garis besar terdiri dari lima bab sebagai berikut :

**Bab I** adalah Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, masalah yang dihadapi sehingga perlu dilakukan penelitian, tujuan penelitian, apa manfaat yang diharapkan dari penelitian, signifikansi penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka merupakan kajian literatur didapatkan dari beberapa sumber yang dianggap relevan. Sumber-sumber literatur digunakan meliputi penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal dan makalah untuk memberikan dasar-dasar pemikiran dalam penelitian.

**Bab III** adalah Metodologi Penelitian. Metodologi penelitian merupakan uraian yang berisikan tahapan-tahapan prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

**Bab IV** adalah Pengumpulan dan Analisis Data. Pada bagian ini diuraikan proses pengumpulan data dan deskripsi data terkumpul serta dilakukan pembahasan terhadap data tersebut untuk menghasilkan suatu kesimpulan akhir.

**Bab V** adalah Kesimpulan dan Saran. Bagian ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah serta saran sehubungan dengan kebijakan yang harus diambil dan penelitian lebih lanjut.